

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian**

Rencana pemerintah melengkapi pembangunan sarana air bersih mencapai 100% pada 2030 mendatang disebabkan oleh kurang tersedianya air bersih di berbagai daerah di Indonesia. Tosiani, (2020) berkata pada Media Indonesia bahwa ketersediaan air bersih rata-rata berada pada presentase 72-90% di 514 kabupaten/kota sedangkan di daerah perkotaan ketersediaan air bersih hanya mencapai persentase 70%.

Kodoatie & Robert, (2002) dalam Rofil (2018) berpendapat bahwa air bersih merupakan prasarana yang penting bagi suatu penduduk untuk menunjang keberlangsungan hidup maupun daerah tersebut. Namun, populasi penduduk yang kian meningkat menyebabkan kebutuhan air bersih juga meningkat baik kuantitas maupun kualitas air bersih tersebut. Air bersih juga sudah menjadi barang komoditi ekonomi yang kian langka, sehingga tidak tersedia secara melimpah ataupun bebas digunakan dan pengelolaan yang tepat menjadi hal yang penting agar air bersih tetap tersedia. Oleh karena itu penting untuk mempersiapkan dengan matang terkait kemudahan akses dan juga volume yang sesuai dengan kebutuhan air bersih di suatu pemukiman serta harga yang terjangkau bagi seluruh lapisan penduduk.

Rofil, 2018 mengemukakan bahwa dampak dari kurangnya ketersediaan air bersih dapat berdampak pada kehidupan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagi masyarakat menengah ke atas bisa memenuhi

kekurangan air bersih dengan membeli tangki air atau air dalam kemasan, tetapi pada masyarakat menengah kebawah akan mengurangi penggunaan air bersih demi mencukupi kebutuhan terhadap air bersih.

Bali memiliki potensi alam dan budaya yang masih bertahan di era globalisasi seperti sekarang ini. Potensi alam dan budaya ini juga sudah terkenal hingga mancanegara, selain itu masyarakatnya yang mampu menjaga keharmonisan antar alam dan budaya, dimana mereka melakukan harmonisasi aspek fisik dan non-fisik dari kedua potensi tersebut.

Dalam melindungi keberadaan alam dan budaya yang ada di bali ini tidak lepas dari ajaran Hindu Bali yaitu konsep Tri Hita Karana yang merupakan konsep menjaga keharmonisan ruang (alam) dan manusia sebagai penggunaannya. Tri Hita Karana juga merupakan konsep tentang manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam. Dan pada konteks ini lebih menekankan pada keharmonisan manusia dengan alam.

Sikap manusia terhadap alam terdiri dari tiga perspektif yaitu sikap taat kepada alam, harmonisasi kepada alam, dan menguasai alam. Masyarakat Bali cenderung berada pada perspektif hubungan yang harmonis kepada alam, sehingga keserasian akan tetap terjaga dengan baik. Hal ini dikarenakan masyarakat Bali memiliki kesadaran akan pentingnya alam sebagai sumber kehidupan di muka bumi ini dan salah satu hasil alam paling penting bagi kehidupan adalah sumber mata air. Di Bali banyak sekali sumber mata air yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat sekitar sehingga diperlukan pengelolaan yang tepat agar tetap terjaga kelestariannya.

Di kawasan Buleleng-Bali, tepatnya di Banjar Badung Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan terdapat sumber mata air yang berlokasi di Pura Dalem Penyuratan. Sumber mata air ini dipergunakan oleh masyarakat setempat untuk dikonsumsi. Dari keterangan yang diberikan oleh narasumber yakni sebagai penanggung jawab/*klian krama* pengelolaan sumber mata air Pura Dalem Penyuratan ini yaitu Ketut Widiarsana, bahwa sumber mata air ini diciptakan tidak dengan asal-asalan, melainkan dengan meminta petunjuk dari Ida Bhatara-Bhatari yang ada di Pura Dalem Penyuratan tersebut. Sehingga pada saat ia mendapatkan petunjuk spiritual yang diyakini dari Ida Bhatara-Bhatari Pura Dalem Penyuratan, akhirnya pada saat itulah mulai dilakukannya pengeboran tanah dan menghasilkan sumber mata air yang berguna bagi warga Banjar badung khususnya dan warga Desa Bungkulan pada umumnya. Pada sumber mata air Pura Dalem Penyuratan ini tidak dikenakan tarif pasti untuk setiap warga desa maupun warga diluar desa untuk *nunas toya* (mengambil air) tersebut. Dikarenakan adanya sumber mata air ini diyakini atas petunjuk dari Ida Bhatara-Bhatari maka pengelola sumber mata air ini membuat keputusan untuk tidak memberatkan warga desa. Uang-uang yang telah terkumpul di dalam kotak *dana punia* ini disebut dengan *sesari toya*, dimana *sesari toya* ini akan dihitung sekalian oleh bendahara pada setiap hari raya Tilem dan penggunaan *sesari* yang telah terkumpul akan digunakan untuk setiap pengeluaran Pura Dalem Penyuratan. Di dalam suatu kelompok organisasi yang sedang menjalankan program kerja dengan melibatkan keluar masuknya dana maka hal tersebut akan memerlukan suatu pencatatan/pembukuan yang akan disuguhkan dengan transparansi dan akuntabilitas kepada pihak internal dan eksternal organisasi.

Pengelolaan keuangan hanya dilakukan oleh kelompok *krama* desa selaku pengelola sumber mata air Pura Dalem Penyuratan dan mengadakan rapat pengurus setiap Rahinan Tilem tanpa pemberitahuan kepada masyarakat atau *pemedek* yang *tangkil* (sembahyang ke pura) yakni mengenai berapa jumlah pemasukan yang diterima (*sesari toya*).

Skala operasional pengelolaan sumber mata air Pura Dalem Penyuratan yaitu uang *dana punia* yang terkumpul dalam kotak *punia* akan dihitung oleh pengurus sumber mata air yakni Ketut Sukranten selaku bendahara dan Nyoman Kerok selaku *juru sapuh*, dimana akan disaksikan oleh Ketut Widiarsana selaku *klian krama*. Uang yang telah dihitung setelahnya akan dicatat pada buku pencatatan yang akan ditulis oleh Putu Sariana selaku sekretaris dan uangnya disimpan oleh Ketut Sukranten selaku bendahara. Uang yang telah terkumpul akan digunakan untuk pengeluaran Pura Dalem Penyuratan. Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan Ketut Widiarsana selaku *klian krama*, mengatakan beliau mempercayakan kepada Ketut Sukranten selaku bendahara bahwa uang yang telah diambil, dikumpulkan, dan dihitung dari kotak *dana punia toya* akan diserahkan kepada bendahara dan tidak diperkenankan untuk disimpan oleh orang lain selain bendahara, yang nantinya uang yang telah terkumpul akan di kelola oleh bendahara entah itu akan di tabungkan, di pinjamkan kepada *krama* lainnya, dan pastinya untuk keperluan pengeluaran Pura Dalem Penyuratan dan sumber mata air.

Berikut ini pemaparan pendapatan uang *dana punia* yang diterima dan di hitung setiap hari raya Tilem oleh pengelola Sumber Mata Air Pura Dalem Penyuratan selama tahun 2020:

Tabel 1.1  
Pendapatan Sumber Air Pura Dalem Penyuratan

No	Tanggal Pendapatan\	Nominal
1	23 Pebruari 2020	Rp 1.031.000
2	24 Maret 2020	Rp 570.000
3	22 April 2020	Rp 570.000
4	22 Mei 2020	Rp 1.200.000
5	20 Juni 2020	Rp 1.530.000
6	20 Juli 2020	Rp 1.520.000
7	18 Agustus 2020	Rp 1.410.000
8	17 September 2020	Rp 1.965.000
9	16 Oktober 2020	Rp 1.880.000
10	15 November 2020	Rp 2.725.000
11	14 Desember 2020	Rp 2.045.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 16.446.000</b>

Sumber: Dokumentasi dan wawancara (2021)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, menyatakan bahwa pendapatan *sesari* Sumber Mata Air Pura Dalem Penyuratan pada bulan Februari-Desember Tahun 2020 berjumlah Rp 16.446.000 (Bulan Januari mata air belum beroperasi). Rincian pendapatan diatas merupakan pendapatan murni dari *sesari* warga pada saat mengambil air pada sumber mata air yang nantinya pendapatan tersebut akan diakumulasikan dengan pendapatan lain-lain yang diterima dari Pura Dalem Penyuratan. Dari Jumlah dari pendapatan yang sudah terakumulasikan akan digunakan untuk keperluan bersama mata air dan Pura Dalem Penyuratan.

Pengelolaan keuangan adalah kemampuan kita untuk mengelola atau mengalokasikan uang atau sesuatu yang berharga dengan tepat, biasanya dengan dibuatnya skala prioritas yang juga dikenal dengan nama “Administrasi Keuangan”. Karena segala aktivitas baik dilakukan untuk diri sendiri maupun pada organisasi membutuhkan dana atau biaya untuk mencapai tujuan. Sehingga diperlukan Administrasi Keuangan yang baik dana tujuan dapat dicapai dengan baik dan maksimal meskipun dengan dana yang terbatas.

Grai *et al.* (2006) dalam Wati (2017) mengatakan bahwa akuntabilitas yang di dalamnya meliputi penyampaian laporan secara transparan yang mana masyarakat atau kelompok berhak untuk tahu tentang laporan tersebut. Sedangkan menurut BPKP (2011) dalam Maria (2016), akuntabilitas merupakan suatu keharusan bagi badan hukum, pimpinan kolektif organisasi mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pihak yang berhak dan memiliki wewenang dalam meminta pertanggungjawaban. Selain itu transparansi dan akuntabilitas merupakan hak dan kewajiban organisasi (Lehman dalam Dewi, 2015). Transparansi merupakan prinsip keterbukaan atas kebijakan suatu organisasi. Pengertian dari transparansi yaitu suatu bentuk kejujuran yang harus dimiliki di dalam organisasi dalam mengungkapkan laporan keuangan dan kinerja manajerialnya. Menurut Standar Akuntansi Publik, 2005 dalam Andini, 2018, Sifat transparansi adalah sifat yang memberi informasi tentang keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat, karena masyarakat berhak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini menggunakan *grand theory* yaitu Teori GCG/*Good Corporate Governance*. Menurut Agoes (2011:101) transparansi adalah proses menentukan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kemampuannya disebut juga tata kelola perusahaan yang baik. Sedangkan GCG menurut Effendi (2016) adalah pengelolaan efek yang signifikan untuk mencapai tujuan bisnis yang dilakukan dengan cara mengamankan aset dan meningkatkan nilai investasi saham dalam jangka waktu yang panjang, hal ini juga merupakan

suatu tujuan dari sistem pengendalian internal atau (*internal control*) suatu perusahaan. Menurut Kaen dan Shaw (2012) dalam Accounting Binus (2019) dalam konsep GCG terdapat 4 komponen utama yaitu *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*. Empat komponen tersebut dianggap penting karena pemberlakuan prinsip *good corporate governance* yang konsisten, pasti akan meningkatkan kualitas dari laporan keuangan dan juga dapat sebagai penghambat aktivitas yang tidak sesuai dengan kebenarannya yang mengakibatkan laporan keuangan tidak wajar. Ditentukannya GCG/*Good Corporate Governance* sebagai *grand theory* dari penelitian ini yaitu dikarenakan Teori *Good Corporate Governance* memiliki komponen-komponen utamanya terdapat akuntabilitas dan transparansi dimana di dalam penelitian ini menggunakan variabel akuntabilitas dan transparansi sebagai variabel X terhadap variabel Y yakni pengelolaan keuangan pada pengelolaan sumber mata air Pura Dalem Penyuratan. Dari pengertian GCG menurut Agoes (2011:101) maka tata kelola perusahaan yang bagus juga disebut sebagai proses transparansi untuk menentukan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kemampuannya. Oleh karena itu peneliti menggunakan teori ini karena selaras dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu mengenai suatu organisasi yang memiliki suatu perputaran uang yang harus memenuhi komponen-komponen dalam *Good Corporate Governance*.

Berdasarkan uraian diatas, keunikan dari penelitian ini yaitu pencatatan yang dilakukan oleh pengelola sumber mata air ini berbeda dengan pencatatan yang biasanya, pencatatan yang biasanya dilakukan setiap terjadinya transaksi tetapi di sumber mata air ini pencatatanya dilakukan setiap rahinan Tilem dan

pencatatannya berupa pencatatan yang sederhana. Pada penelitian ini juga terdapat beberapa istilah-istilah yang digunakan, yaitu seperti *rahinan* (hari raya), *krama* (penanggungjawab), *nunas toya* (meminta air/mengambil air), *dana punia* (uang amal), *tangkil* (sembahyang), *sesari toya* (uang yang di berikan oleh warga yang mengambil air dan dimasukkan dalam kotak *punia*). Pada penelitian ini juga kurangnya sikap transparan dan akuntabel dari pengelola sumber mata air ini karena tidak ada pemberitahuan yang jelas kepada pemedek dan warga desa selain anggota organisasi mengenai jumlah pendapatan dan pengeluaran yang terjadi. Peneliti juga belum menemukan penelitian sejenis pada lokasi penelitian ini yaitu pada Sumber Mata Air Pura Dalem Penyuratan di Banjar Badung Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Selain itu variabel yang digunakanyaitu variabel Akuntabilitas dan Transparansi yang pastinya sangat perlu diterapkan pada organisasi atau kelompok dalam suatu wilayah/daerah agar organisasi/kelompok tersebut memiliki suatu integritas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Digunakannya variabel akuntabilitas dan transparansi yaitu dikarenakan peneliti ingin meneliti sifat akuntabilitas dan transparansi dari pengelola Sumber Mata Air Pura Dalem Penyuratan. Penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan yang terjadi pada pengelolaan sumber mata air Pura Dalem Penyuratan. Maka peneliti melaksanakan penelitian yang berjudul **“Mengungkap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Pengelolaan Sumber Mata Air Pura Dalem Penyuratan di Banjar Badung Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Masalah yang ada pada penelitian ini berawal dari pertanggungjawaban yang kurang jelas dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh pengurus/pengelola sumber mata air Pura Dalem Penyuratan di Banjar Badung Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Pada penelitian ini penulis membatasi pembahasan pada sistem pengelolaan keuangan berdasarkan akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh pengurus/pengelola sumber mata air Pura Dalem Penyuratan di Banjar Badung Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.

### **1.4 Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah latar belakang pembentukan sumber mata air Pura Dalem Penyuratan di Banjar Badung Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimanakah sistem pengelolaan keuangan pada sumber mata air Pura Dalem Penyuratan di Banjar Badung Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui latar belakang pembentukan sumber mata air Pura Dalem Penyuratan di Banjar Badung Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.

2. Memahami sistem pengelolaan keuangan pada sumber mata air Pura Dalem Penyuratan di Banjar Badung Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah diharapkan hasil penelitian dapat menjadi bahan untuk mengembangkan ilmu akuntansi khususnya mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh sumber mata air Pura Dalem Penyuratan di Banjar Badung Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.

### **b. Manfaat Praktis**

1. Bagi pengurus/pengelola Sumber Mata Air Pura Dalem Penyuratan

Hasil penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberi gambaran atau suatu informasi mengenai praktik akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sumber mata air Pura Dalem Penyuratan di Banjar Badung Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai sistem pengelolaan keuangan pada sumber mata air Pura Dalem Penyuratan di Banjar Badung Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.

### 3. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi jika tertarik dalam meneliti mengenai sistem pengelolaan keuangan sumber mata air Pura Dalem Penyuratan di Banjar Badung Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.

